

LAPORAN KEUANGAN



**SEMESTER I
2021**

BADAN URUSAN ADMINISTRASI MAHKAMAH AGUNG RI PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG

LAPORAN KEUANGAN PTA BANDAR LAMPUNG
Bagian Anggaran 005.04.1200
Badan Peradilan Agama
Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung
Jl. Basuki Rahmat No.24 Teluk Betung Utara Bandar Lampung
Telp. (0721) 489813 - 481814 Fax. (0721) 478054
Web. www.pta-bandarlampung.go.id



pta_bdllampung



kepegawaian.ptalampung@gmail.com



Pengadilan Tingi Agama Balam

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Tinggi Agama mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).



Bandar Lampung, 26 Juli 2021
Kuasa Pengguna Anggaran,

Hendriansyah, S.H., M.H.
NIP. 197107311997031001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	6
V. Catatan atas Laporan Keuangan	7
A. Penjelasan Umum	7
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	28
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	32
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	39
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	42
F. Pengungkapan Penting Lainnya	46
VI. Lampiran	

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Semester I Tahun 2021 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.



Bandar Lampung, 26 Juli 2021
Kuasa Pengguna Anggaran,

Hendriansyah, S.H., M.H.
NIP. 197107311997031001

Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung Tahun 2021 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2021. Realisasi Pendapatan Negara pada Tahun 2021 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp340,000 atau mencapai 68.00 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp500,000. Realisasi Belanja Negara pada TA 2021 adalah sebesar Rp6,596,000 atau mencapai 4.13 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp159,541,000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 30 Juni 2021. Nilai Aset per 30 Juni 2021 dicatat dan disajikan sebesar Rp80,663,562 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp80,663,562 Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0 Aset Tetap (neto) sebesar Rp0 dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp0 Nilai Kewajiban dan Ekuitas sebesar Rp80,663,562.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp340.000 sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional

adalah sebesar Rp6,596,000 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai (Rp6,256,000) Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp0 dan sebesar Rp0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar (Rp6,256,000).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2021 adalah sebesar Rp4,132,271 dikurangi Defisit-LO sebesar (Rp6,256,000) ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp0 dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp3,687,291 Kenaikan/Penurunan Ekuitas senilai Rp(2,568,708) sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 30 Juni 2021 adalah senilai Rp1,563,562.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2021 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2020 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

KANTOR PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 Juni 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2021		% thd Angg	2020
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	500.000	340.000	68,00	230.000
JUMLAH PENDAPATAN		500.000	340.000	68,00	230.000
BELANJA	B.2.				
Belanja Pegawai	B.3	-	-	0,00	-
Belanja Barang	B.4	159.541.000	6.596.000	4,13	-
Belanja Modal	B.5	-	-	0,00	-
Belanja Bantuan Sosial	B.6	-	-	0,00	-
JUMLAH BELANJA		159.541.000	6.596.000	4,13	-

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

II. NERACA

KANTOR PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG NERACA PER 30 Juni 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2021	2020
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	79.100.000	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	-	-
Piutang Bukan Pajak	C.4	-	-
Bagian Lancar TP/TGR	C.5	-	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.6	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	C.7	-	-
Belanja Dibayar di Muka	C.8	-	-
Pendapatan yang Masih harus Diterima	C.9	-	-
Persediaan	C.10	1.563.562	4.132.271
Jumlah Aset Lancar		80.663.562	4.132.271
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Tagihan TP/TGR	C.11	-	-
Tagihan Penjualan Angsuran	C.12	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	C.13	-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
ASET TETAP			
Tanah	C.14	-	-
Peralatan dan Mesin	C.15	-	-
Gedung dan Bangunan	C.16	-	-
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.17	-	-
Aset Tetap Lainnya	C.18	-	-
Konstruksi dalam pengerjaan	C.19	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.20	-	-
Jumlah Aset Tetap		-	-
ASET LAINNYA			
Aset Tidak Berwujud	C.21	-	-
Aset Lain-Lain	C.22	-	-
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.23	-	-
Jumlah Aset Lainnya		-	-
JUMLAH ASET		80.663.562	4.132.271
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Uang Muka dari KPPN	C.24	79.100.000	-
Utang kepada Pihak Ketiga	C.25	-	-
Pendapatan Diterima di Muka	C.26	-	-
Beban yang Masih Harus Dibayar	C.27	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		79.100.000	-
JUMLAH KEWAJIBAN		79.100.000	-
EKUITAS			
Ekuitas	C.28	1.563.562	4.132.271
JUMLAH EKUITAS		1.563.562	4.132.271
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		80.663.562	4.132.271

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

III. LAPORAN OPERASIONAL

KANTOR PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 Juni 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2021	2020
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	340.000	230.000
JUMLAH PENDAPATAN		340.000	230.000
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	-	-
Beban Persediaan	D.3	-	-
Beban Barang dan Jasa	D.4	-	-
Beban Pemeliharaan	D.5	-	-
Beban Perjalanan Dinas	D.6	6.596.000	-
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	-	-
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	-	-
JUMLAH BEBAN		6.596.000	-
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(6.256.000)	230.000
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.11		
Surplus Penjualan Aset Nonlancar		-	-
Defisit Penjualan Aset Non Lancar		-	-
Defisit Selisih Kurs		-	-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		-	-
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(6.256.000)	230.000
POS LUAR BIASA	D.12		
Pendapatan PNB		-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		(6.256.000)	230.000

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

KANTOR PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 Juni 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2021	2020
EKUITAS AWAL	E.1	4.132.271	-
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(6.256.000)	230.000
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3		-
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.3.1	-	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3.2	-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3.3	-	-
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.3.4	-	-
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.3.5	-	-
KOREKSI LAIN-LAIN	E.3.6	-	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	3.687.291	(230.000)
KENAIKAN / PENURUNAN EKUITAS		(2.568.709)	-
EKUITAS AKHIR	E.5	1.563.562	-

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung

Dasar Hukum

*Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis*

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
5. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-62/PB/2009 tentang Tata Cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja Secara Akrual Pada Laporan Keuangan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;

9. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum.
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.06/2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
11. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 03 tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
13. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-57/PB/2013 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014.

Rencana Strategis

Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1992 tanggal 31 Agustus 1992 tentang pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, Pengadilan Tinggi Agama Jambi dan Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung.

Peresmian operasional Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung dilaksanakan pada tanggal 8 Februari 1993

oleh Ketua Mahkamah Agung RI yang diwakili oleh hakim agung M. Yahya, S.H. bertempat di Pendopo Gubernur Provinsi Lampung. Selanjutnya tanggal tersebut dijadikan momentum peringatan HUT Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung setiap tahunnya.

Tahun 2021 merupakan bagian dari rencana strategis Mahkamah Agung 2020 – 2024 dimana pelaksanaan dan perencanaan sudah berbasis kinerja. Program dan kegiatan Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung pada tahun 2020 s.d 2024 mengacu pada program-program yang dicanangkan oleh Mahkamah Agung dan dituangkan dalam visi dan misi Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung.

Visi Mahkamah Agung adalah “TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG”, yang bertujuan agar Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya menjadi lembaga yang dihormati, dimana didalamnya dikelola oleh hakim dan pegawai yang memiliki kemuliaan dan kebesaran serta keluhuran sikap dan jiwa dalam melaksanakan tugas pokoknya, yaitu memutus perkara. Sedangkan Misi Mahkamah Agung adalah :

- Menjaga kemandirian badan peradilan
- Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
- Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan
- Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan

Kemudian visi dan misi Mahkamah Agung tersebut dijadikan acuan bagi Pengadilan Tinggi Agama Bandar

Lampung sebagai visi dan misinya.

Adapun Visi Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung adalah : Mewujudkan Peradilan Agama Yang Agung di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung . Sedangkan Misi Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung adalah sebagai berikut :

- Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparansi.
- Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat.
- Meningkatkan kinerja manajemen peradilan diwilayah Pengadilan Tinggi Agama Banda Lampung.
- Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien.
- Melaksanakan tertib admistrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien.
- Mendorong terbentuknya pengadilan agama di kabupaten/kota pemekaran di Provinsi Lampung.
- Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Didasari oleh visi dan misi tersebut diatas, Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung menetapkan tujuan strategis sebagai berikut :

- Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi.
- Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan.
- Publik percaya bahwa Pengadilan Agama Bandar Lampung dapat memenuhi butir 1 dan 2 di atas.
- Pelayanan peradilan agama yang cepat, sederhana dan biaya ringan.

- Tenaga teknis yang berkualitas dan profesional.
- Manajemen Teknologi Informasi dalam pelayanan peradilan agama.
- Tersedianya sarana dan prasarana sebagai supporting unit seluruh kegiatan tupoksi PTA. Bandar Lampung.

Lalu dari tujuan strategis diatas ditetapkan sasaran strategis sebagai berikut :

- Meningkatnya penyelesaian perkara
- Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim
- Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
- Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice).
- Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan
- Meningkatnya kualitas pengawasan
- Peningkatan kualitas SDM
- Peningkatan layanan perkantoran dan penyediaan , perawatan, pemeliharaan sarana dan prasarana.

Selain itu sebagai salah satu Pengadilan Tingkat Banding yang di tunjuk Mahkamah Agung dalam mengelola, membina, mengawasi dan mengontrol / memonitoring pelaksanaan pelaporan sistem akuntansi keuangan dan sistem akuntansi barang di lingkup wilayahnya memiliki visi dan misi tersendiri yang didasari oleh visi dan misi Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung tersebut diatas.

Adapun Visi Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung dalam hal keuangan adalah Mewujudkan Laporan Keuangan yang relevan, andal, dapat dibandingkan serta dapat dipahami sehingga tidak diragukan lagi

akan menghasilkan Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga yang relevan, andal, dapat dibandingkan serta dapat dipahami sehingga dapat diyakini kewajarannya oleh auditor eksternal. Sedangkan Misi Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung dalam hal keuangan adalah sebagai berikut :

- Mewujudkan pelaksanaan & pengelolaan manajemen satuan kerja yang baik dan berkesinambungan.
- Meningkatkan kualitas efisiensi, efektifitas kinerja satuan kerja dilingkungan Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung.
- Mewujudkan sumber daya manusia di bidang pelaporan yang profesional, bersih, berwibawa dan berakhlakul karimah di lingkungan PTA. Bandar Lampung.
- Mewujudkan pelaporan keuangan & pelaporan barang yang sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP).

Kemudian Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung sebagai satuan kerja juga menetapkan tujuan strategis sebagai berikut :

- Terelenggaranya pelaporan di bidang keuangan dan BMN yang sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP).
- Terwujudnya manajemen satuan kerja yang cepat, akurat dan bebas KKN.
- Meningkatnya pengelolaan pelaporan keuangan & pelaporan BMN yang efektif, efisien dan akuntabel.
- Meningkatnya kualitas sumber daya manusia di bidang pelaporan keuangan & pelaporan BMN.

Lalu dari tujuan strategis diatas ditetapkan sasaran strategis sebagai berikut :

- Memperjuangkan peningkatan anggaran DIPA yang dialokasikan sesuai dengan kebutuhan, yang terdiri dari :
 - Anggaran yang digunakan untuk kegiatan pengumpulan data ADK dan konsultasi bulanan dengan KPPN Bandar Lampung.
 - Anggaran yang digunakan untuk kegiatan rekonsiliasi data semesteran dengan KPKNL Bandar Lampung.
 - Anggaran yang digunakan untuk kegiatan pelatihan operator dalam rangka mengikuti pelatihan-pelatihan yang diadakan / diselenggarakan oleh Korwil / KPPN / DJPB / KPKNL / DJKN mengenai peraturan-peraturan baru / aplikasi berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan.
 - Anggaran yang digunakan untuk pembuatan dan pencetakan laporan keuangan dan laporan barang semesteran dan tahunan.
 - Anggaran yang digunakan untuk kegiatan koordinasi dan konsultasi bulanan dengan Ditjen Perbendaharaan dan Ditjen Kekayaan Negara.
 - Anggaran yang digunakan untuk pengelolaan alat tulis kantor (ATK) kegiatan korwil.
- Membuat perencanaan jadwal rutin satuan kerja sesuai dengan tupoksi yang terdiri dari :
 - Jadwal kegiatan pengumpulan data ADK dan konsultasi bulanan dengan KPPN Bandar Lampung, yaitu setiap awal bulan.
 - Jadwal kegiatan pengumpulan Data Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Wilayah dan satuan kerja baik LRA yang menggunakan format pertama anggaran kegiatan (MAK) per program maupun format aplikasi SAK. Kegiatan ini

dilakukan sebelum tanggal 15 setiap bulannya.

- Jadwal kegiatan rekonsiliasi data semesteran dengan KPKNL Bandar Lampung. Kegiatan ini dilakukan setiap awal bulan 7 (tujuh) tahun anggaran berjalan dan awal bulan 1 (satu) tahun anggaran berikutnya.
- Jadwal kegiatan rekonsiliasi data semesteran dengan Ditjen Kekayaan Negara Lampung. Kegiatan ini dilakukan setiap awal bulan 7 (tujuh) tahun anggaran berjalan dan awal bulan 1 (satu) tahun anggaran berikutnya.
- Jadwal kegiatan pelatihan operator-operator baru dan sosialisasi peraturan-peraturan / aplikasi berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan. Kegiatan pelatihan dan pembinaan operator-operator baru dilaksanakan setahun sekali setiap awal tahun.

Jadwal kegiatan penyusunan dan pencetakan laporan keuangan satuan kerja dan laporan barang satuan kerja semesteran dan tahunan. Kegiatan ini dilakukan 2 (dua) kali setiap akhir bulan 7 (tujuh) tahun anggaran berjalan dan akhir bulan 1 (satu) tahun anggaran berikutnya.

- Meningkatkan kegiatan sosialisasi dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pelaporan keuangan & pelaporan BMN.
 - Untuk pelatihan dan pembinaan, kegiatan difokuskan pada pelatihan dan pembinaan operator-operator baru akibat dari operator yang lama terkena proses mutasi. Ini adalah masalah klasik yang mau tidak mau pasti akan dihadapi. Karena itu setiap korwil seharusnya sudah mempersiapkan kemungkinan seperti ini dengan

mempersiapkan pelatihan dan pembinaan secara terjadwal setiap tahun sekali.

- Sedangkan untuk kegiatan sosialisasi di fokuskan kepada penyampaian peraturan-peraturan baru seperti peraturan penyampaian laporan pendapatan dan belanja secara akrual, pengisian format BKU dengan rumus excel, cara pembuatan/pengisian laporan ralisasi anggaran per MAK per program dan LRA format Aplikasi SAIBA dan lain-lain. Lebih lanjut, selain sebagai Korwil di Lampung Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung sebagai satuan kerja memiliki visi dan misi tersendiri yang didasari oleh visi dan misi Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung tersebut diatas. Adapun visi Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung sebagai satuan kerja adalah mewujudkan laporan keuangan satuan kerja yang relevan, andal dapat dibandingkan serta dapat dipahami sehingga tidak diragukan lagi akan menghasilkan laporan keuangan wilayah yang relevan, andal, dapat dibandingkan serta dapat dipahami sehingga dapat diyakini kewajarannya oleh auditor eksternal.

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

Laporan Keuangan Semester I Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung TA 2021 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh entitas pelaporan Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data,

pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.3. Basis Akuntansi

*Basis
Akuntansi*

Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2021 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung. Disamping itu, dalam penyusunannya

telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan- LRA

Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan- LO

Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.

- Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) Belanja

Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) Beban

Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) Aset

Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan

kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal

- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:

- harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
- harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan

operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.

- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama

Masa Manfaat.

- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

*Piutang
Jangka
Panjang*

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

e. Aset Lainnya

Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak

berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.

- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak	50

Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6) Kewajiban

Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

B.1 Pendapatan

*Realisasi
Pendapatan
Rp340.000*

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp340,000 atau mencapai 68.00 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp500,000 Pendapatan Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung terdiri dari Pendapatan Jasa dan Pendapatan Lain-lain dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2021		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan kejaksaan dan peradilan lainnya	500.000	340.000	68,00
Pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan	-	-	-
Pendapatan legalisasi tanda tangan	-	-	-
Jumlah	500.000	340.000	68,00

B.2 Belanja

*Realisasi
Belanja Negara
Rp6,596,000*

Realisasi Belanja instansi pada Semester I Tahun 2021 adalah sebesar Rp6,596,000 atau 4,13 persen dari anggaran belanja sebesar Rp159,541,000 Rincian anggaran dan realisasi belanja Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2021

Uraian	2021		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	-	-	-
Belanja Barang	159.541.000	6.596.000	4,13
Belanja Modal	-	-	-
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Total Belanja Kotor	159.541.000	6.596.000	4,13
Pengembalian	-	-	-
Jumlah	159.541.000	6.596.000	4,13

Dibandingkan dengan 2020, Realisasi Belanja 2021 mengalami kenaikan sebesar 100 persen dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan antara lain karena adanya perjalanan dinas dalam rangka pembinaan dan pengawasan ke satker di bawah Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung.

Perbandingan Realisasi Belanja 30 Juni 2021 dan 2020

URAIAN	REALISASI 2021	REALISASI 2020	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	-	-	-
Belanja Barang	6.596.000	-	100,00
Belanja Modal	-	-	-
Jumlah	6.596.000	-	100,00

B.3 Belanja Pegawai

*Belanja
Pegawai Rp0*

Realisasi Belanja Pegawai 30 Juni 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

B.4 Belanja Barang

*Belanja
Barang
Rp6,596,000*

Realisasi Belanja Barang 30 Juni 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp6,596,000 dan Rp0 Realisasi Belanja Barang 2021 mengalami kenaikan sebesar 100 persen dari Realisasi Belanja Barang TA 2020. Hal ini antara lain disebabkan karena adanya perjalanan dinas dalam rangka pembinaan dan pengawasan ke satker di bawah Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung.

Perbandingan Belanja Barang 2021 dan 2020

URAIAN	REALISASI 2021	REALISASI 2020	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	-	-	0,00
Belanja Barang Non Operasional	-	-	0,00
Belanja Jasa	-	-	0,00
Belanja Pemeliharaan	-	-	0,00
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	6.596.000	-	100,00
Belanja barang persediaan	-	-	0,00
Jumlah Belanja Kotor	6.596.000	-	100,00
Pengembalian Belanja	-	-	
Jumlah Belanja	6.596.000	-	100,00

Belanja Modal
Rp0

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal 30 Juni 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

B.5.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah 30 Juni 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp0 dan realisasi 2020 sebesar Rp0.

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal 30 Juni 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan 30 Juni 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

B.5.5 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya 30 Juni 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

*Kas di
Bendahara
Pengeluaran
Rp79,100,000*

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2021 dan Juni 2020 adalah masing-masing sebesar Rp79,100,000 dan Rp0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung-jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

*Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran 2021 dan Juni
2020*

Keterangan	2021	2020
Uang Tunai	79.100.000	-
Kas lainnya atau setara kas	-	-
Jumlah	79100000	-

C.2 Kas Lainnya dan Setara Kas

*Kas Lainnya
dan Setara
Kas Rp0*

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 30 Juni 2021 dan Juni 2020 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas 2021 dan 2020

Keterangan	2021	2020
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	-	-
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	-	-
Kas Lainnya di KL dari Hibah yang Belum Disahkan	-	-
Jumlah	-	-

C.3 Piutang PNB

Piutang PNB
Rp0

Saldo Piutang PNB per tanggal 30 Juni 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang PNB merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang PNB disajikan sebagai berikut:

Rincian Piutang PNB 2021 dan 2020

Uraian	2021	2020
Piutang PNB	-	-
Piutang Lainnya	-	-
Jumlah	-	-

C.4 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Bagian Lancar
Tagihan
TP/TGR
Rp0

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per tanggal 30 Juni 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Bagian Lancar TP/TGR merupakan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

C.5 Penyisihan Piutang Tak Tertagih –Piutang Lancar

Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih –

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar per 30 Juni 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar adalah

<i>Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar Rp0</i>	per 30 Juni 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur.
--	---

C.6 Belanja Dibayar di Muka

<i>Belanja Dibayar di Muka Rp0</i>	Saldo Belanja Dibayar di Muka per tanggal 30 Juni 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Belanja Dibayar di Muka adalah sebagai berikut.
------------------------------------	--

C.7 Persediaan

<i>Persediaan Rp1,563,562</i>	Nilai Persediaan per 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020 masing-masing adalah sebesar Rp1,563,562 dan Rp4,132,271. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian
-------------------------------	---

C.8 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

<i>Tagihan TP/TGR Rp0</i>	Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 30 Juni 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan
---------------------------	---

bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

C.9 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

<i>Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Rp0</i>	Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang per 30 Juni 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tak Tertagih– Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.
---	---

C.10 Tanah

<i>Tanah Rp0</i>	Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung per 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp0 dan Rp0.
----------------------	---

C.11 Peralatan dan Mesin

<i>Peralatan dan Mesin Rp0</i>	Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 30 Juni 2021 dan 2020 adalah Rp0 dan Rp0.
--	---

C.12 Gedung dan Bangunan

<i>Gedung dan Bangunan Rp0</i>	Nilai Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020 adalah Rp0 dan Rp0.
--	---

C.13 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

<i>Jalan,Jaringan dan Irigasi Rp0</i>	Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.
---	--

C.14 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya Rp0 Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020 adalah Rp0 dan Rp0.

C.15 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Konstruksi Dalam Pengerjaan Rp0 Saldo konstruksi dalam pengerjaan 2020 dan 30 Juni 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 .

C.16 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Rp0 Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020 adalah masing-masing Rp0 dan Rp0. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

C.17 Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud Rp0 Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020 adalah Rp 0 dan Rp 0. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik.

C.18 Aset Lain-Lain

Aset Lain-Lain Saldo Aset Lain-lain per 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020 adalah Rp0 dan Rp0. Aset Lain-lain merupakan Barang

Rp0 Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas.

C.19 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya Rp0 Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020 adalah masing-masing Rp0 dan Rp0. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

C.20 Uang Muka dari KPPN

Uang Muka dari KPPN Rp0 Saldo Uang Muka dari KPPN per per 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

C.21 Utang kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga Rp0 Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan.

C.22 Pendapatan Diterima di Muka

Pendapatan Diterima di Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan

Muka Rp0 Rp0. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah diterima pembayarannya, namun barang/jasa belum diserahkan.

C.23 Beban yang Masih Harus Dibayar

Beban yang Masih Harus Dibayar Rp0 Beban yang Masih Harus Dibayar per 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020 sebesar Rp0 dan Rp0. merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya.

C.24 Ekuitas

Ekuitas Rp1,563,562 Ekuitas per 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020 adalah masing-masing sebesar Rp1,563,562 dan Rp4,132,271 Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D.PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

*Pendapatan
PNBP
Rp340,000*

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp340,000 dan Rp230,000. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak 2021 dan 2020

URAIAN	2021	2020	NAIK (TURUN) %
Pendapatan kejaksaan dan peradilan lainnya	340.000	230.000	47,83
Jumlah	340.000	230.000	47,83

D.2 Beban Pegawai

*Beban
Pegawai Rp0*

Jumlah Beban Pegawai pada TA 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

D.3 Beban Persediaan

*Beban
Persediaan
Rp0*

Jumlah Beban Persediaan pada Tahun 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-

barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

D.4 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa Rp0

Jumlah Beban Barang dan Jasa Tahun 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Rp0

Beban Pemeliharaan Tahun 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Rp6,596,000

Beban Perjalanan Dinas 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp6,596,000 dan Rp0. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas 2021 dan 2020

URAIAN JENIS BEBAN	2021	2020	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	6.596.000	-	100,00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	-	-	0,00
Jumlah	6.596.000	-	100,00

D.7 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

<i>Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Rp0</i>	Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk TA 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.
--	--

PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1 Ekuitas Awal

Ekuitas Awal
Rp4,132,271 Nilai ekuitas pada tanggal 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020 adalah masing-masing sebesar Rp4,132,271 dan Rp0.

E.2 Surplus (Defisit) LO

Defisit LO
(Rp6,256,000) Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 2020 adalah sebesar (Rp6,256,000) dan Rp230,000. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset

Penyesuaian
Nilai Aset
Rp0 Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai
Persediaan
Rp0 Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk tahun 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang

Revaluasi Aset Tetap Rp0 muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

E.3.4 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi Rp0 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

E.3.5 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain Rp0 Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

E.4 Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas Rp3,687,291 Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020 adalah masing-masing sebesar Rp3,687,291 dan (Rp230,000). Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	(340.000)
Ditagikan ke Entitas Lain	6.596.000
Transfer Masuk	-
Transfer Keluar	(2.568.709)
Pengesahan Hibah Langsung	-
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-
Jumlah	3.687.291

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagikan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagikan ke Entitas Lain

merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 30 Juni 2021, DDEL sebesar (Rp340,000) sedangkan DKEL sebesar Rp6,596,000.

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN. Transfer Masuk sampai dengan tanggal 30 Juni 2021 sebesar Rp0 dan transfer keluar sebesar (Rp2,568,709).

E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 30 Juni 2021 sebesar Rp0. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 30 Juni 2021 adalah Rp0.

E.5 Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir
Rp1,563,562

Nilai Ekuitas pada tanggal 30 Juni 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp1,563,562 dan Rp0.

A. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Setelah tanggal Neraca tidak terdapat kejadian-kejadian penting pada kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

NERACA PERCOBAAN AKRUAL
30 JUNI 2021

-

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT SATUAN KERJA
PER JUNI 2021
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005	MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : 04	DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
WILAYAH/PROVINSI : 1200	LAMPUNG
SATUAN KERJA : 547679	PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG

Tgl. Cetak 26/07/2021 2:20 PM
lap_neraca_percobaan_akrual_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111613	Kas di Bendahara Pengeluaran TUP	79,100,000	0
0.0	117111	Barang Konsumsi	1,563,562	0
0.0	219511	Uang Muka dari KPPN	0	79,100,000
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	6,596,000
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	340,000	0
0.0	313211	Transfer Keluar	2,568,709	0
0.0	391111	Ekuitas	0	4,132,271
3.0	425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	0	340,000
3.0	524111	Beban Perjalanan Biasa	6,596,000	0
JUMLAH			90,168,271	90,168,271

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER JUNI 2021 DAN 2020
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005

MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : 04

DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

KDUAPPAW : 005041200KD

BA(005) ES1(04) LAMPUNG

KODE SATKER : 547679

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG

Tgl. Cetak 26/07/2021 3:18 AM
lap_neraca_satker_komparatif –rekon17

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2021	2020	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas di Bendahara Pengeluaran	79,100,000	0	79,100,000	0.00
Persediaan	1,563,562	4,132,271	(2,568,709)	(62.16)
JUMLAH ASET LANCAR	80,663,562	4,132,271	76,531,291	1,852.04
JUMLAH ASET	80,663,562	4,132,271	76,531,291	1,852.04
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Uang Muka dari KPPN	79,100,000	0	79,100,000	0.00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	79,100,000	0	79,100,000	
JUMLAH KEWAJIBAN	79,100,000	0	79,100,000	
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	1,563,562	4,132,271	(2,568,709)	(62.16)
JUMLAH EKUITAS	1,563,562	4,132,271	(2,568,709)	(62.16)
JUMLAH EKUITAS	1,563,562	4,132,271	(2,568,709)	(62.16)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	80,663,562	4,132,271	76,531,291	1,852.04

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
30 JUNI 2021

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2021 DAN 2020
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG 005
 ESELON I : DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA 04
 SATUAN KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG 547679

Kode Lap : LRA.F.S
 Tanggal : 26/07/21 2:20 PM
 Halaman : 1
 Prg ID : lap_lra_face_satker_komparatif -

NO	URAIAN	2021				2020			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6	3	4	5	6
A	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH				0				0
	PENERIMAAN PERPAJAKAN	0	0	0	0	0	0	0	0
	PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	500,000	340,000	160,000	68	1,300,000	230,000	1,070,000	18
	PENERIMAAN HIBAH	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH	500,000	340,000	160,000	68	1,300,000	230,000	1,070,000	68
B	BELANJA				0				0
	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA BARANG	159,541,000	6,596,000	152,945,000	4	173,615,000	0	173,615,000	0
	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA PEMBAYARAN KEWAJIBAN	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA SUBSIDI	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA HIBAH	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA BANTUAN SOSIAL	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA LAIN-LAIN	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH BELANJA (B I + B II)	159,541,000	6,596,000	152,945,000	4	173,615,000	0	173,615,000	0
C	PEMBIAYAAN				0				0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
30 JUNI 2021

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2021**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005
ESELON I : 04
WILAYAH/PROVINSI : 1200
SATUAN KERJA : 547679
JENIS SATUAN KERJA : KD

MAHKAMAH AGUNG
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
BA(005) ES1(04) LAMPUNG
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG

Kode Lap : LRA.B.S.
Tanggal : 26/07/21 3:19 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_akun --
Tgl Data : 20/5/19 12:00 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	0	7,200,000	0	0	0	0	7,200,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	0	7,200,000	0	0	0	0	7,200,000
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	6,871,000	10,541,000	0	0	0	0	10,541,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	6,871,000	10,541,000	0	0	0	0	10,541,000
5221	Belanja Jasa							
522151	Belanja Jasa Profesi	15,000,000	15,000,000	0	0	0	0	15,000,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	15,000,000	15,000,000	0	0	0	0	15,000,000
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Biasa	123,220,000	115,350,000	6,596,000	0	6,596,000	5.72	108,754,000
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	14,450,000	11,450,000	0	0	0	0	11,450,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	137,670,000	126,800,000	6,596,000	0	6,596,000	5.2	120,204,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	159,541,000	159,541,000	6,596,000	0	6,596,000	4.13	152,945,000
	JUMLAH BELANJA	159,541,000	159,541,000	6,596,000	0	6,596,000	4.13	152,945,000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
30 JUNI 2021

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
MENURUT KELOMPOK PENDAPATAN / AKUN
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2021
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG
ESELON I : 04 DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
WILAYAH/PROVINSI : 1200 LAMPUNG
SATUAN KERJA : 547679 PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG

Kode Lap : LRA.P.E1.1
Tanggal : 26/07/21 3:19 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_pen_akun_satker --

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK					
4252	Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum					
425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	500,000	340,000	0	340,000	68
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4252	500,000	340,000	0	340,000	68
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	500,000	340,000	0	340,000	68
	JUMLAH PENDAPATAN	500,000	340,000	0	340,000	68

LAPORAN OPERASIONAL
30 JUNI 2021

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2021 DAN 2020
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN	: 005	MAHKAMAH AGUNG	Kode Lap : LO.SAT
ESELON I	: 04	DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA	Tanggal : 26/07/21 3:18 AM
WILAYAH/PROVINSI	: 1200	LAMPUNG	Halaman : 1
SATUAN KERJA	: 547679	PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG	Prg ID : lap_lo_satker --
JENIS SATUAN KERJA	: KD		Tgl Data : 20/05/19 12:00 AM

URAIAN	2021	2020	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	0	0	0	
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	340,000	230,000	110,000	47.826
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	340,000	230,000	110,000	47.826
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	340,000	230,000	110,000	47.826
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	0	0	0	
Beban Persediaan	0	0	0	
Beban Barang dan Jasa	0	0	0	
Beban Pemeliharaan	0	0	0	
Beban Perjalanan Dinas	6,596,000	0	6,596,000	
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	0	0	0	
Beban Bunga	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	

**LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2021 DAN 2020
(dalam rupiah)**

KEMENTERIAN : 005 MAHKAMAH AGUNG
ESELON I : 04 DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
WILAYAH/PROVINSI : 1200 LAMPUNG
SATUAN KERJA : 547679 PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG
JENIS SATUAN KERJA : KD

Kode Lap : LO.SAT
Tanggal : 26/07/21 3:18 AM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lo_satker --
Tgl Data : 20/05/19 12:00 AM

URAIAN	2021	2020	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	0	0	0	
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	6,596,000	0	6,596,000	
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(6,256,000)	230,000	(6,486,000)	(2,820)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(6,256,000)	230,000	(6,486,000)	(2,820)
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(6,256,000)	230,000	(6,486,000)	(2,820)

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
30 JUNI 2021

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT SATKER
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2021 DAN 2020
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN : 005 MAHKAMAH AGUNG
ESELON I : 04 DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
WILAYAH/PROVINSI : 1200 LAMPUNG
JENIS SATUAN KERJA : KD
SATUAN KERJA : 547679 PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG

Kode Lap : LPE.SATKER
Tanggal : 26/07/21 3:19 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lpe_satker --rekon17

URAIAN	2021	2020	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	4,132,271	0	4,132,271	-
SURPLUS/DEFISIT-LO	(6,256,000)	230,000	(6,486,000)	-
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI	0	0	0	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	0	0	0	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0	0	0	-
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	0	0	0	-
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	-
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	0	0	0	-
LAIN-LAIN	0	0	0	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	3,687,291	(230,000)	3,917,291	-
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(2,568,709)	0	(2,568,709)	-
EKUITAS AKHIR	1,563,562	0	1,563,562	-

LAPORAN BARANG PERSEDIAAN
30 JUNI 2021

**LAPORAN BARANG PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2021**

UAPB : 005 MAHKAMAH AGUNG
UAKPB : 547679 PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG

Tanggal : 26/07/21 3:20 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_persediaan_satker

Kode	Uraian	Jumlah
117111	Barang Konsumsi	
1010399999	Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1,563,562
Jumlah Barang Konsumsi		1,563,562
TOTAL		1,563,562

Keterangan :

1. Persediaan senilai Rp. 0 dalam kondisi rusak.
2. Persediaan senilai Rp. 0 dalam kondisi usang.

LAPORAN POSISI BMN DI NERACA
30 JUNI 2021

LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA
POSISI PER TANGGAL 30 JUNI 2021
TAHUN ANGGARAN 2021

UAPB : 005 MAHKAMAH AGUNG
UAKPB : 547679 PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG

Tanggal : 26/07/21 3:20 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_neraca_face_sat

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
1	2	3
117111	Barang Konsumsi	1,563,562
J U M L A H		1,563,562

**KERTAS KERJA TELAAH
LAPORAN KEUANGAN
30 JUNI 2021**

KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN
TINGKAT SATKER
PERIODE TA. 2020 AUDITED

Kode BA dan Nama BA : (005) Mahkamah Agung
 Kode Es1 dan Nama Es1: (04) Badan Peradilan Agama
 Kode Wilayah dan Nama Wilayah: (1200) Lampung
 Kode Satker dan Nama Satker: (547679) Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung

Objek Penelaahan	Kondisi LK	Tidak	Seharusnya
<i>Beri tanda centang (v) sesuai Laporan Keuangan. Jika tidak ada data, isi dengan N/A</i>			
<i>Bila terisi pada kolom yang tidak seharusnya, agar diuraikan pada lembar lampiran</i>			
KELENGKAPAN LAPORAN KEUANGAN			
Kelengkapan Komponen Laporan Keuangan Pokok (Hardcopy)	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Pernyataan Tanggung Jawab	v		Ada
2. LRA, Neraca, LO dan LPE face	v		Ada
3. Catatan atas Laporan Keuangan	v		Ada
Laporan Keuangan Tambahan	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Neraca Percobaan Akrua	v		Ada
2. Neraca Percobaan Kas	v		Ada
3. Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja	v		Ada
KESESUAIAN LAPORAN HARDCOPY DENGAN E-REKON&LK			
	Sama	Tidak	Seharusnya
1. Apakah semua face laporan (LRA, LO, LPE dan Neraca) sama dengan e-Rekon&LK termasuk perbandingan dengan tahun 2019?	v		Sama
<i>Laporan Keuangan disusun menggunakan e-Rekon&LK sehingga harus sama, apabila ada yang tidak sama, uraikan dalam Lampiran Telaah dan penyebabnya.</i>			
KESESUAIAN DENGAN PERSAMAAN DASAR AKUNTANSI			
Neraca Balance	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah Satker Neracanya tidak balance ? Cek di e-Rekon&LK melalui menu "Daftar >> Neraca Tidak Balance"		v	Tidak
Saldo antar Laporan	Sama	Tidak	Seharusnya
2. Apakah Nilai "Surplus/(Defisit)-LO" di LO = Nilai "Surplus/ (Defisit) - LO" di LPE	v		Sama
3. Apakah Saldo "Ekuitas Akhir" di LPE = "Saldo Ekuitas" di Neraca	v		Sama
<i>Apabila terjadi, biasanya karena ada akun-akun yang tidak ada dalam Referensi sehingga tidak terkalkulasi</i>			
NERACA PERCOBAAN AKRUAL			
PENGECHEKAN SALDO YANG TIDAK NORMAL DAN TIDAK ADA REFERENSINYA	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah akun dengan uraian "null" atau "uraian tidak ada" ? (Cek di e-Rekon&LK, menu Daftar >> Akun Non Ref)		v	Tidak
2. Adakah "Saldo Tidak normal"? (Cek e-Rekon&LK, menu "Daftar >> Saldo Tidak Normal"), kecuali akun "Beban Penyisihan Piutang" dan "Kas dan Bank BLU Belum Disahkan"		v	Tidak
TELAH PER AKUN PADA NERACA PERCOBAAN			
AKUN ASET (1xxxxx)	Ada	Tidak	Seharusnya
Adakah akun Aset (1xxxxx) yang semestinya tidak terdapat di K/L tersebut, misal Persediaan			
1. Amunisi yang ada di Kementerian Kesehatan, atau persediaan Bansos di LIPI, atau Piutang BLU Iayanan Kesehatan di Kemenristek Dikti.		v	Tidak
2. Adakah Akun 1111xx hingga 1115xx? (Kas Setara Kas yang boleh ada di KL hanya Akun dari 1116xx hingga 1119xx, selainnya adalah akun BUN)		v	Tidak
Akun Dibayar dimuka (prepaid) dan Uang Muka Belanja Khusus BUN (Transaksi Hibah, Bunga, Subsidi, Lain-lain, dan Transfer merupakan Transaksi BUN)	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Akun 114113/4/6/7 Belanja Pembayaran Bunga/Lain-lain/Hibah/Subsidi dibayar dimuka (prepaid)		v	Tidak
2. Akun 114214/5/6/8 Uang Muka Belanja Bunga/Subsidi/ Hibah/Lain-lain		v	Tidak

AKUN KEWAJIBAN (2xxxxx)		Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Akun 212114/6/9 Belanja Hibah/Utang/Lain-lain Yang Masih Harus Dibayar		✓	Tidak
Telaah Akun Hibah Langsung Yang Belum Disahkan (akun 218211)		Ya	Tidak	Seharusnya
1.	Adakah saldo 218211-Hibah langsung yang belum disahkan pada awal tahun? (Cek di Neraca Percobaan saldo awal)		✓	Ya/Tidak
2.	Apabila terdapat Saldo Awal Akun 218211, Apakah Nilainya sama dengan Akun 391133-Pengesahan Hibah Langsung TAYL pada akhir tahun 2020? (untuk mengecek akun 391133, Cetak di Neraca Percobaan Tahunan 2020)		✓	Ya
3.	Jika saldo awal akun 218211 tidak sama saldo akun 391133 di akhir tahun, apakah terdapat Hibah TAYL yang belum disahkan?		✓	Tidak
<i>Sehubungan terbitnya Surat S-876/PB/2020 ttg Penyelesaian Hibah Langsung Bentuk Uang/Barang/Jasa/ Surat Berharga Tahun Anggaran Yang Lalu, satker yang memiliki hibah langsung TAYL diwajibkan untuk mengesahkan pendapatan hibahnya sehingga saldo akun hibah langsung yang belum disahkan pada laporan keuangan Tahunan adalah Hibah Tahun Anggaran Berjalan yang belum disahkan.</i>				
4.	Jika ada akun 111827-Kas Lainnya dari Hibah Yang Belum disahkan, apakah nilainya ≤ akun 218211 ?			Ya
AKUN EKUITAS (3xxxxx)		Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Adakah akun 391117-Penyesuaian Nilai Persediaan		✓	Tidak
2.	Adakah akun 391121-Ekuitas Transaksi Lainnya Kec. Di RRI, TVRI dan POLRI		✓	Tidak
3.	Adakah Saldo akun 391114-Revaluasi Aset Tetap		✓	Ya
4.	Adakah Saldo akun 391151-Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya		✓	Ada/Tidak
5.	Jika ada, Apakah Saldo akun 391151-Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya berasal dari transaksi reklasifikasi Aset Tetap /Aset Lainnya dengan masa manfaat yang berbeda dan/atau reklasifikasi persediaan menjadi aset ekstrakomptabel atau sebaliknya		✓	Ya
6.	Apakah Saldo akun 391131-Pengesahan Hibah Langsung ≥ akun 111822-Kas Lainnya di Kementerian Negara/ Lembaga dari Hibah		✓	Ya
<i>saldo akun 391151 hanya berasal dari selisih akumulasi penyusutan aset yang dilakukan reklas keluar dan reklas masuk. Nilai aset yang direklas keluar dan direklas masuk semestinya sama. Selisih transaksi reklas keluar dan reklas masuk aset tetap/persediaan bisa ditelusuri dari menu jurnal penyesuaian di Aplikasi F-rekon</i>				
Akun 313221-Transfer Masuk (TM) dan akun 313211-Transfer Keluar (TK)				
1.	Nilai absolut selisih Transfer Keluar dan Transfer Masuk pada excel Monitoring TK/TM e-Rekon&LK	0		
<i>Selisih secara absolut diperoleh dari e-rekon&LK (menu monitoring >> Transfer Masuk/Keluar), dengan mengurangkan kolom TK dengan kolom TM, kemudian hasilnya diabsolutkan (yang hasilnya negatif, dibuat positif). Apakah ada penjelasan secara manajemen penyebab selisih TKTM secara absolut tsb ?</i>				
2.	Nilai selisih TK/TM secara Neto/Akun TK dikurang TM di Neraca Percobaan	0		
AKUN PENDAPATAN (4xxxxx)				
Akun Pendapatan Perpajakan (41xxxx)		Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Adakah akun 41xxxx-Pendapatan Perpajakan kecuali BA.015.04 ?		✓	Tidak
Ketepatan penggunaan Akun PNBPN Baru (Kepdirjen 211/PB/2018 BAS)		Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Adakah akun 423xxx		✓	Tidak
2.	Adakah akun 421xxx khusus BUN? Yaitu 421111, 421211, 421621		✓	Tidak
3.	Adakah akun 422xxx khusus BUN? Yaitu 4221xx		✓	Tidak
4.	Adakah akun 425xxx khusus BUN? Antara lain 425143, 425144, 425161, 425162, 425745, 425772, 425773, 425774, 425815, 425816, 425998		✓	Tidak

Akun Penerimaan Kembali Belanja Khusus BUN		Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Adakah Akun 425914/5/6/8/9 Penerimaan kembali belanja Kewajiban Utang/Subsidi/hibah/ lain-lain/transfer TAYL		√	Tidak
Pengecekan akun yang tidak sesuai karakteristik tupoksi entitas		Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Adakah akun yang tidak normal keberadaannya?, <i>misalnya pendapatan SIM/STNK/Kejaksaaan terdapat pada Kementerian Kesehatan</i>		√	Tidak
2.	Adakah akun 425719-Pendapatan Bunga Lainnya Di KL? <i>seharusnya 425764-Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)</i>		√	Tidak
Akun Pendapatan Hibah (43xxxx)		Ya	Tidak	Seharusnya
1.	Adakah akun 43xxxx-Pendapatan Hibah		√	Tidak
Telaah Akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)		Ya	Tidak	Seharusnya
1.	Apakah ada akun 491429-Pendapatan Perolehan Aset Lainnya?		√	Ya/Tidak
2.	Jika ada, apakah benar? <i>(Bukan karena salah pilih menu dalam aplikasi atau salah kode akun saat menjurnal?)</i>		√	Ya/Tidak
AKUN BELANJA (5xxxxx)		Ya	Tidak	Seharusnya
1.	Adakah akun 54/55/56/57xxx (Beban Bunga, Subsidi, Hibah, lain-lain) ?		√	Tidak
TELAAH TERKAIT BLU		Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Adakah akun "Kas dan Bank BLU Belum Disahkan"		√	Tidak
2.	Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada Aplikasi e-rekon? <i>(cek pada Aplikasi e-Rekon pada menu Monitoring Lainnya, Rekap Resiprokal)</i>		√	Tidak
Jika TIDAK Memiliki Satker BLU		Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Adakah akun 424xxx-Pendapatan BLU		√	Tidak
2.	Adakah akun 525xxx (Belanja Barang dan Jasa BLU)		√	Tidak
3.	Adakah akun 527xxx (Belanja Modal BLU)		√	Tidak
Telaah Akun 491511-Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan dan 593311 Beban Penyesuaian Nilai Persediaan		Ya	Tidak	Seharusnya
1.	Isi kolom di sebelah kanan saldo akun 491511			0
2.	Isi kolom di sebelah kanan saldo akun 593311			0
3.	Isi kolom di sebelah kanan hasil dari akun 491511 dikurangi akun 593311			-
4.	Apakah nilai angka 1, 2, dan 3 diatas normal ? Tidak terlalu besar atau terlalu kecil?		√	Tidak
<i>Untuk mengetahui apakah selisih tsb. Wajar, dapat dengan cara: membandingkan dengan tahun lalu, men-sort ascending per satker dan menelaah apakah normal (misalnya satker kecil namun nilainya lebih besar dari Satker Besar), atau membuat benchmark per Satker kecil/satker besar dan cara2 lainnya.</i>				
5	Adakah akun 491511/593311 yang berasal dari transaksi Reklas Keluar (K10)/Reklas Masuk(M07)		√	Tidak
<i>Jenis Transaksi K10-Reklas Keluar dan M07-Reklas Masuk seharusnya menghasilkan akun "391151-Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya". Jika masih terdapat Jenis transaksi tersebut yang menghasilkan 491511/593311, satker tersebut belum melakukan update Aplikasi persediaan dan melakukan pengiriman ulang dari bulan januari. Untuk menelusuri dapat dilakukan dengan mencetak excel "Jurnal Umum Penyesuaian" di menu "daftar" di Aplikasi e-Rekon kemudian filter Jenis Transaksi K10/M07</i>				
6.	Apakah terdapat pengeluaran belanja untuk Penanganan Pandemi Covid-19?		√	Ya/Tidak
7.	Apabila terdapat pengeluaran belanja dalam rangka Penanganan Pandemi Covid-19, apakah belanja tersebut sudah menggunakan kode akun khusus untuk Penanganan Pandemi Covid-19?		√	Ya

LAPORAN OPERASIONAL			
Pengecekan Pos/Akun yang tidak boleh ada	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah pendapatan Perpajakan (Kecuali BA.015)		✓	Tidak
2. Adakah pendapatan Hibah		✓	Tidak
3. Adakah beban bunga		✓	Tidak
4. Adakah beban subsidi		✓	Tidak
5. Adakah beban hibah		✓	Tidak
6. Adakah beban transfer		✓	Tidak
7. Adakah beban lain-lain		✓	Tidak
Pengecekan saldo Normal	Ada	Tidak	Seharusnya
8. Adakah akun "null" atau tidak ada uraiannya (saldo akun "null" biasanya disebabkan karena belum dilakukan update aplikasi)		✓	Tidak
9. Apakah seluruh akun bernilai positif, kecuali Beban Penyisihan Piutang	✓		Ya
<i>Seluruh Akun LO Nilai Normalnya adalah Positif (baik pada Kegiatan Operasional, Non Operasional maupun Pos Luar Biasa), kecuali beban penyisihan piutang dapat bernilai negatif. (yang harus positif adalah akunnnya, sedangkan penjumlahan/sub penjumlahan pada LO dapat bernilai Negatif).</i>			
Kebenaran Beban Penyisihan Piutang sesuai Perdirjen 43/2015	Ya	Tidak	Seharusnya
10. Saldo Awal Penyisihan Piutang (Jk.Pendek dan Jk.Panjang) - Saldo Akhir Penyisihan Piutang (Jk.Pendek dan Jk.Panjang) = Beban Penyisihan Piutang LO	✓		Ya
<i>Jika hasil diatas "tidak", maka cek apakah ada penghapusan piutang dan/atau koreksi piutang senilai selisih diatas. Jika tidak ada, kemungkinan salah dalam menjurnal penyisihan piutang.</i>			
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS			
	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Apakah ada saldo pos "Selisih Revaluasi Aset"		✓	Tidak
<i>Jika ada, telusuri saldo tersebut terdapat di satker mana melalui aplikasi e-rekon kemudian pastikan kebenaran dokumen sumbernya.</i>			
2. Pada LPE, apakah "Ekuitas Awal" + "Kenaikan/Penurunan Ekuitas" = "Ekuitas Akhir"	✓		Sama
<i>Apabila perhitungan no.2 menghasilkan "tidak sama" berarti ada Satker melakukan jurnal menggunakan akun 391111</i>			
Pengecekan akun koreksi	Ya	Tidak	Seharusnya
Cek seluruh akun koreksi yaitu 391113, 391114, 391116, 391118 dan 391119			
1. Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun koreksi dimaksud ?		✓	Ya
Contoh 1 : Pengungkapan 391116 (Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi) senilai Rp 151.500.000 disebabkan oleh Transaksi Saldo Awal (100) senilai Rp100.000.000, Transaksi Koreksi Nilai/Kuantitas (204) Rp 51.500.000 dengan dokumen sumber BAST.			
Contoh 2 : Pengungkapan akun 391119-Koreksi lainnya senilai Rp 23.500.000 disebabkan oleh adanya kesalahan pencatatan utang senilai Rp23.000.000 dan pencatatan piutang senilai 500.000 di tahun anggaran yang lalu sehingga dilakukan dikoreksi di tahun berjalan			
NERACA			
	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Apakah Kas Di Bendahara Pengeluaran = Uang Muka dari KPPN	✓		Ya
2. Apakah ada Penjurnalan akun "Belum Diregister" yang dipasangkan dengan beban ?		✓	Tidak
<i>Pastikan tidak terdapat jurnal manual yang dilakukan oleh operator dalam rangka menghilangkan Akun belum diregister dengan memasangkannya dengan akun beban yang disebabkan karena kesalahan akun belanja. Jurnal tersebut dapat ditelusuri dengan mencetak excel "Jurnal Umum Penyesuaian" di menu "daftar" di Aplikasi e-Rekon kemudian memilih jenis jurnal "ALL" atau "JRNADJ" dan "JRNUMUM", kemudian filter kode akun register (D/K) dan Akun Beban (D/K)</i>			
3. Dari kolom perbandingan antara 30 Juni 2021 dengan 30 Juni 2020 adakah Kenaikan/ Penurunan nilai per pos Neraca yang tidak wajar (terlalu tinggi/rendah) tanpa penjelasan?		✓	Tidak
4. Normalnya total ASET akan naik dibanding Audited 2020, Apakah demikian?	✓		Ya

TELAAH ANTAR LAPORAN KEUANGAN

Jika Jawaban awal "ADA", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "ADA", sebaliknya, bila jawaban awal "TIDAK", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya juga "TIDAK"

Pengecekan Saldo Kas di Bendahra Pengeluaran	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Apakah Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran = LPJ Bendahara dan Aplikasi Silabi ?	✓		Ya
Pengecekan telah melakukan penyisihan piutang	Ada	Tidak	Seharusnya
2. Ada Akun Piutang/Piutang TP/Piutang TGR (Neraca) maka akan ada akun:		✓	Ada/Tidak
- Penyisihan Piutang/Penyisihan Bagian Lancar TP/TGR/Penyisihan TP/TGR (Neraca)		✓	Ada
- Beban Penyisihan Piutang (di LO)		✓	Ada
Pengecekan telah melakukan reklasifikasi piutang jk. Panjang	Ada	Tidak	Seharusnya
3. Ada akun Piutang Jangka Panjang (TP/TGR/Lainnya) maka akan ada akun:		✓	Ada/Tidak
- Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang		✓	Ada
Pengecekan persediaan	Ada	Tidak	Seharusnya
4. Ada persediaan (Neraca) maka akan ada akun:		✓	Ada/Tidak
- Beban Persediaan (di LO)		✓	Ada
- 491511-Pendapatan Penyesuaian Persediaan di Neraca Percobaan		✓	Ada/Tidak
- 593311-Beban Penyesuaian Persediaan di Neraca Percobaan			Ada/Tidak
Pengecekan penyusutan aset tetap	Ada	Tidak	Seharusnya
5. Ada Aset Tetap/Aset Lainnya (Neraca) maka akan ada akun:		✓	Ada/Tidak
- Akumulasi AT/AL (Neraca)		✓	Ada
- Beban Penyusutan/Amortisasi (di LO)		✓	Ada
<i>Mulai tahun 2020 dengan e-Rekon&LK G2 dimungkinkan ada Satker yang lupa melakukan penyusutan/amortisasi Semester II</i>			
Pengecekan Beban Diserahkan ke Masyarakat & Beban Bansos	Ada	Tidak	Seharusnya
6. Adakah beban barang diserahkan ke Masyarakat?		✓	Ya/Tidak
Jika Ya, adakah realisasi akun 526xxx pada neraca percobaan kas ?		✓	Ya
7. Adakah beban bansos?		✓	Ya/Tidak
Jika Ya, adakah realisasi akun 57xxxx pada neraca percobaan kas ?		✓	Ya
Pengecekan Jurnal Akruai	Ada	Tidak	Seharusnya
8. Adakah realisasi pendapatan Sewa di Neraca Percobaan Kas (425131/2/3 atau 42492x)?		✓	Ada/Tidak
- Adakah akun 219211-Pendapatan sewa diterima Dimuka pada Neraca ?		✓	Ada/Tidak
9. Adakah realisasi 522141-Belanja Sewa di Neraca Percobaan Kas () ?		✓	Ada/Tidak
- Adakah belanja Barang dibayar dimuka pada Neraca		✓	Ada/Tidak
10. Adakah realisasi belanja Jasa Listrik/telepon/air di Neraca Percobaan Kas (522111/2/3/9) ?		✓	Ada/Tidak
- Ada Belanja Barang yang masih harus dibayar pada Neraca		✓	Ada
KESESUAIAN DENGAN L-BMN			
Rekon Internal LKKL dengan L-BMN	Ya/Ada	Tidak	Seharusnya
1. Apakah ada selisih Saldo pada Rekon Internal Sawal di e-Rekon&LK?		✓	Tidak
2. Apakah ada selisih Saldo pada Rekon Internal Bulan Desember 2020 di e-Rekon&LK?		✓	Tidak
<i>Pada e-Rekon&LK G2 lihat menu "Monitoring BMN>> Rekap Rekon Internal dan Rekap Rekon Internal Sawal"</i>			
Apakah menurut e-Rekon-lk terdapat Jurnal Tidak lazim (menu Daftar >> Jurnal Tidak Lazim) yaitu jurnal dengan akun Persediaan/Aset yang seharusnya hanya kiriman dari Aplikasi SIMAK ?		✓	Tidak
4. Jika ada, apakah jurnal tersebut telah benar?	✓		Ya

Validasi Transaksi BMN Pada Aplikasi e-Rekon		Ada	Tidak	Seharusnya
Apakah terdapat transaksi BMN yang terkena validasi pada Aplikasi e-Rekon&LK yang meliputi , Nilai Perolehan Minus, Nilai Buku Minus dll. (Masuk ke Aplikasi e-Rekon&LK, kemudian pilih "daftar BMN")			✓	
MENU DAFTAR BMN		Seharusnya	Ya	Tidak
1	Adakah Nilai Perolehan Minus (Intrakomptabel)?	Tidak		✓
2	Berapa NUP BMN dengan Nilai Perolehan Minus? (diisi jumlah NUP)			-
3	Berapa Total Nilai BMN dengan Nilai Perolehan Minus? (diisi nilai rupiahnya)			-
4	Adakah Nilai Buku Minus (Intrakomptabel)?	Tidak	✓	
5	Berapa NUP BMN dengan Nilai Perolehan Minus? (diisi jumlah NUP)			-
6	Berapa Total Nilai BMN dengan Nilai Perolehan Minus? (diisi nilai rupiahnya)			-
LAPORAN REALISASI ANGGARAN				
		Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Adakah Pagu Minus? (Cek melalui e-Rekon-lk menu daftar >> pagu minus")		✓	Tidak
2.	Adakah uraian jenis belanja "tidak ada" pada Neraca Percobaan Kas?		✓	Tidak
Pengecekan TDK				
1.	Adakah TDK Belanja Netto baik di Satker Aktif, Tidak Aktif Bersaldo dan tidak aktif tidak bersaldo		✓	Tidak
2.	Adakah TDK Pendapatan Netto di Satker Aktif, Tidak Aktif dan tidak aktif bersaldo ?		✓	Tidak
3.	Adakah TDK Pendapatan MPHL-BJS		✓	Tidak
4.	Adakah TDK Kas di Bendahara BLU baik di Satker Aktif, Tidak Aktif Bersaldo dan tidak aktif tidak bersaldo		✓	Tidak
5.	Adakah TDK Kas di Bendahara Pengeluaran baik di Satker Aktif, Tidak Aktif Bersaldo dan tidak aktif tidak bersaldo		✓	Tidak
6.	Adakah TDK Kas Hibah baik di Satker Aktif, Tidak Aktif Bersaldo dan tidak aktif tidak bersaldo		✓	Tidak
e-Rekon&LK Menu Monitoring >> Transaksi Dalam Konfirmasi" atas seluruh jenis TDK baik pada Satker DIPA Aktif, Tidak Aktif Bersaldo dan tidak aktif tidak bersaldo				
SATKONS dan PENGAWASAN TEMUAN BPK TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA				
Telaah ini bertujuan meminimalisir adanya temuan tahun lalu yang belum diselesaikan dan terjadinya temuan yang berulang. Dibawah ini adalah contoh-contoh telaahnya.				
Satker Konsolidasian		Ya	Tidak	Seharusnya
1.	Apakah Jurnal tahun 2020 telah diselesaikan (Dinihilkan) ?	✓		
2.	Apakah telah dilakukan Jurnal Take-In Reval dengan benar ?	✓		
Cek kebenaran apabila ada Jurnal baru di Tahun 2020				
Pertanyaan berdasarkan temuan-temuan BPK tahun-tahun lalu (Disesuaikan dengan kondisi masing-masing satker)		Ya	Tidak	Seharusnya
1.	Apakah sudah dibuat Berita Acara Stock Opname Persediaan ?	✓		Ya
2.	Apakah semua jurnal manual di SAIBA telah dibuatkan Memo Penyesuaian beserta dokumen pendukung terkait?	✓		Ya
3.	Masih adakah kesalahan akun belanja Persediaan		✓	Tidak
4.	Apakah PNBPN telah disetor tepat pada waktunya (tidak terlambat)	✓		Ya
5.	Adakan PNBPN digunakan langsung?		✓	Tidak
6.	Apakah seluruh pendapatan dan Belanja BLU telah disahkan (di-SP3B-BLUkan)?	✓		Ya
7.	Apakah seluruh hibah langsung telah disahkan (di-SP2HL-kan)?	✓		Ya
8.				Ya

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Kesesuaian antara Face Laporan dan CaLK		Sama	Tidak	Seharusnya
1.	Rincian yang ada di CaLK sama dengan LKKL (Neraca Percobaan)	✓		Sama
<i>Masih sering ditemukan kesalahan ketik nilai2 yang seharusnya dituliskan di CaLK.</i>				
Kecukupan pengungkapan pada CaLK (Bila akun tsb ada)		Ya/Ada	Tidak	Seharusnya
2.	Apakah pengungkapan Revaluasi BMN telah sesuai baik pada Penjelasan Umum, LO, LPE dan Neraca ?	✓		Ya
3.	Apakah pengungkapan dan ikhtisar Transaksi yang bersumber dari PHLN telah secara memadai sesuai format ?	✓		Ya
4.	Apakah pengungkapan KDP telah sesuai?	✓		Ya
5.	Apakah ada penjelasan akun "Dana Yang Dibatasi Penggunaannya" ?	✓		Ada
<i>Akun Kas dan Akun lainnya yang substansinya merupakan Kas adalah akun yang "sensitif", pastikan kebenaran seluruh akun tsb., bila perlu bandingkan dengan LPJ Bendahara dan Rekening Koran.</i>				
7.	Apakah terdapat penjelasan akun Hibah Langsung yang Belum Disahkan ?			Ya
8.	Apakah format dan penjelasan akun-akun LPE telah sesuai? Terutama penjelasan akun Koreksi?			Ya
9	Apakah belanja dalam rangkai penanganan Pandemi Covid-19 telah dijelaskan dalam CaLK?			Ya
ANALISIS LAINNYA				
Analisis Laporan Keuangan Lainnya		Ya	Tidak	Seharusnya
1.	Apakah Realisasi Belanja 51 + 525111 = Beban Pegawai pada Laporan Operasional	✓		Ya
2.	Apakah realisasi belanja 53 = (Pembelian Aset Tetap+Perolehan KDP+Pengembangan KDP)- Hibah Langsung Barang	✓		Ya
3	Apakah Beban Penyusutan/Amortisasi = Akumulasi Penyusutan/Amortisasi 2020 - Saldo Awal Penyusutan/Amortisasi 2020	✓		Ya
4.	Apakah Beban Persediaan = Saldo Awal + Pembelian - Saldo Akhir (<i>rumus perhitungan beban persediaan terlampir</i>)	✓		Ya
Pengungkapan Dampak dan Penanganan Pandemi COVID-19				
Kecukupan pengungkapan pada CaLK - LRA		Ada	Tidak	
1.	Apakah terdapat pengungkapan atas <i>Refocussing</i> kegiatan/Realokasi anggaran/Revisi DIPA terkait penanganan Pandemi Covid-19		✓	
2.	Jika terdapat <i>Refocussing</i> kegiatan/Realokasi anggaran/Revisi DIPA terkait penanganan Pandemi Covid-19, berapa nominal perubahannya (kenaikan/penurunan) pada total anggaran K/L			Rp -
3	Apakah terdapat pengungkapan atas perubahan Estimasi Pendapatan (Pajak dan/atau PNBPN) sebagai dampak Pandemi Covid-19		✓	
4.	Apakah terdapat pengungkapan atas realisasi Pendapatan (Pajak dan/atau PNBPN) khususnya sebagai dampak Pandemi Covid-19		✓	
5.	Apakah terdapat pengungkapan atas realisasi Belanja dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 dengan menggunakan akun Non penanganan pandemi Covid-19		✓	
6.	Apakah terdapat pengungkapan atas realisasi Belanja dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 dengan menggunakan akun penanganan pandemi Covid-19	✓		
Kecukupan pengungkapan pada CaLK - Laporan Operasional		Ada	Tidak	
7.	Apakah terdapat pengungkapan atas perubahan Realisasi Pendapatan - LO (Pajak dan/atau PNBPN) sebagai dampak Pandemi Covid-19		✓	
8.	Apakah terdapat pengungkapan atas realisasi Beban dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 dengan menggunakan akun Non penanganan pandemi Covid-19		✓	
9.	Apakah terdapat pengungkapan atas realisasi Beban dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 dengan menggunakan akun penanganan pandemi Covid-19		✓	

Kecukupan pengungkapan pada CaLK - Laporan Perubahan Ekuitas		Ada	Tidak
10.	Apakah terdapat pengungkapan atas Transaksi Antar Entitas berupa Transfer Masuk – Transfer Keluar, dapat berupa pengiriman barang persediaan, peralatan dan mesin berupa alat kesehatan, dan/atau jenis-jenis BMN lainnya yang spesifik untuk penanganan pandemi COVID-19.		✓
11.	Apakah terdapat pengungkapan atas realisasi pengesahan hibah langsung baik berupa uang, barang, maupun jasa yang diterima oleh K/L dalam rangka penanganan pandemi COVID-19		✓
Kecukupan pengungkapan pada CaLK - Neraca		Ada	Tidak
12.	Apakah terdapat pengungkapan atas Pos Aset, antara lain :		✓
	a. Kenaikan/penurunan Piutang sebagai dampak pandemi Covid-19		✓
	b. Kenaikan/penurunan Persediaan sebagai dampak pandemi Covid-19		✓
	c. Kenaikan/penurunan KDP sebagai dampak pandemi Covid-19		✓
	d. Kenaikan/penurunan pos aset yang lain, sebutkan		✓
13.	Apakah terdapat pengungkapan atas Pos Kewajiban, antara lain :		✓
	a. Kenaikan/penurunan Utang kepada pihak ketiga sebagai dampak pandemi Covid-19		✓
	b. Kenaikan/penurunan Hibah yang belum disahkan sebagai dampak pandemi Covid-19		✓

Analisis Laporan Keuangan Lainnya dimungkinkan menghasilkan perhitungan yang tidak sama dengan rumus. Namun perlu dianalisis penyebab selisihnya. Analisis dapat dilakukan dengan bantuan ayat Jurnal Penyesuaian (excel) yang tersedia pada Aplikasi e-Rekon&LK.

LAMPIRAN KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN

"Uraikan kode akun dan penyebab terisi pada kolom yang TIDAK SEHARUSNYA, serta hal-hal lainnya yang diperlukan, termasuk perbedaan dengan e-Rekon&LK"



Mengetahui

Pejabat Penvusun LKKL.

Hendriansyah, SH.,MH.)

NIP. 197107311997031001

Bandarlampung, 26 Juli 2021

Penelaah.

(Budiyanto, SH.)

NIP. 197704262014081001